



MATRIKS 13 PROGRAM PERJUANGAN PARTAI BURUH

RAPAT KERJA NASIONAL PARTAI BURUH
14 - 17 JANUARI 2023

TOLAK I

LHP

SAHKAN

PERJUANGKAN
JAMINAN SOSIAL

TOLAK

MUSYAW
AT KERSIA

TOLAK U P
MU

Makmur, Produktif, Penuhdaya, Adil dan Persejahteraan

LAND L
REFORM

ARM
ARIA

T O L A
OUTSOURC

BERANTAS KORUPSI

DAN KEDAUL

PANGAN

Usut Tuntas
Sampai Khabis
Pembungkaman
HAM

yang sudah direkomendasikan
oleh KOMNASHAM



KEDAULATAN RAKYAT

EKONOMI

- STRUKTUR KREDIT YANG TIMPANG , 83% KREDIT PERBANKAN MENGALIR KE SERATUSAN PERUSAHAAN BESAR DAN BUMN SEMENTARA SISANYA 17% KREDIT DIPEREbutKAN OLEH JUTAAN UMKM. KREDIT UMKM HARUS DIPERBANYAK SEHINGGAKADE DEPAN STRUKTUR KREDIT MENJADI LEBIH ADIL. SETIDAKNYA 60% (UNTUK PERUSAHAAN BESAR) BERRBANDUNG 40% (UNTUK UMKM).
- NEGARA MELINDUNGI DAN MENGEMBANGKAN KOPERASI-KOPERASI DI INDONNESIA HINGGA ADA YANG KELAK MENJADI KOPERASI-KOPERASI YANG DAPAT BERSAING DENGAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN BESAR, TERUTAMA DALAMSEGI ASET DAN MODAL

POLITIK

- MENGUBAH KONFIGURASI POLITIK INDONESIA. MENGHAPUSKAN *PRESIDENTIAL THRESHOLD* & *PARLIAMENTARY THRESHOLD* DENGAN JALAN MEREVISI UU PEMILU & PARPOL.
- MENGUSULKAN JUGA UNTUK DITERAPKAN REFORMASI PEMBIAYAAN PARPOL AGAR KE DEPANNYA BIAYA POLITIK DITANGGUNNG NEGARA UNTUK MENCEGAH TERJADINYA KORUPSI
- SELAMA INI SUARA RAKYAT HANYA DIPERLUKA 5 TAHUNN SEKALI SAAT PEMILU. KITA INGIN SUARA RAKYAT JUGA DIDENGARKAN SAAT MEMUTUSKAN ISU-ISU YANG STRATEGIS DAN MENYANGKUT HAJAT HIDUP ORANG BANYAK, DALAM BENTUK REFERENDUM.

HUKUM

- KEBEBASAN BERPENDAPAT HARUS DILINDUNGI OLEH HUKUM. PASAL KARET DANG MENGHAMBAT KEBEBASAN BERPENDAPAT SEPERTI YANG ADA DALAM KHUP DAN UU ITE HARUS DIHAPUSKAN

SOSIAL BUDAYA

- MELINDUNGI DAN MENGEMBANGKAN BUDAYA DAERAH AGAR DAPAT MEMBENDUNG PENGARUH BUDAYA ASING (SEPERTI K-POP) SEHINGGA. KARAKTER BUDAYA BANGSA DAPAT DITULARKAN KE BANGSA-BANGSA LAIN
- MENJAGA BUDAYA GOTONG ROYONG DALAM KEHIDUPAN RAKYAT DENGAN JALAN KERJA BAKTI LINGKUNGAN DAN PERTUNJUKKAN SENI BUDAYA DI TIAP PERKAMPUNGAN RAKYAT
- MENDORONG AGAR BANGGA MENJALANI BUDAYA SENDIRI, SEPERTI PENGGUNNAAN BAHASA DAERAH

LAPANGAN KERJA

EKONOMI

- SAAT INI SEBANYAK 139 JUTA ANGKATAN KERJA, HANYA 84 JUTA ORANG (60%) YANG BEKRJA PENUH. SEMENTARA 55 JUTA ORANG ADALAH PENGGANGGURAN, SETENGAH PENGANGGURAN DAN PARUH WAKTU. OLEH KARENA ITU UNTUK MENYERAP 55 JUTA ORANG TERSEBUT KITA HARUS MELAKUKAN INDUSTRIALISASI NASIONAL YANG BISA MEMBANGKITKAN PEREKONOMIAN NASIONAL SEHINGGA BISA TUMBUH DI ATAS 10% SETIAP TAHUN SELAMA 10 TAHUN
- MENEGAKKAN PASAL 33 UUD 1945 DENGAN NEGARA (DALAM BENTUK BUMN) MENGUASAI HINGGA 55% SELURUH KONSESI TAMBANG DAN MINERBA YANG SUDAH HABIS, SEDANGKAN 45% KEPEMILIKAN DIBERIKAN KEPADA SWASTA.
- MERENEGOISASI SELURUH UTANG PEMERINTAH (MELALUI MEKANISME **DEBT SWAP & DEBT TO NATURE SWAP**) UNTUK MENGURANGI BEBAN PEMBAYARAN BUNGA UTANG DI APBN, SEHINGGA APBN DAPAT MENYISIHKAN ANGGARAN LEBIH UNTUK MENDORONG PEREKONOMIAN.

POLITIK

- MENCABUT UU CIPTA KERJA DAN SEGALA PERATURAN TURUNANNYA, DAN MEMBATALKAN REVISI UU MINERBA
- MENGUBAH SISTEM IMPOR PANGAN DARI KUOTA MENJADI SISTEM TARIF IMPOR DENGAN TUJUAN UNTUK MEMBERANTAS MAFIA ATAU KARTEL IMPOR PANGAN SEHINGGA HARGA-HARGA PANGAN DI RAKYAT DAPAT TURUN SIGNIFIKAN
- MEMASTIKAN PERATURAN TERJADINYA ALIH TEKNOLOGI DALAM INVESTASI ASING

HUKUM

- LAPANGANN KERJA ADALAH HAK ASASI MANUSIA, DILINDUNGI OLEH KONSTITUSI. OLEH KARENA ITU NEGARA DAN APARATUSNYA HARUS BERPIHAK KEPADA PERLINDUNGANHAK PEKERJA
- MEMBANTU PENEGAK HUKUM DAN PERUSAHAAN DALAM MENGATASI PUNGLI DAN KORUPSI DI LAPANGA SERTA JUGA DI BIROKRASI

SOSIAL BUDAYA

- MENDORONG BIUDAYA PRODUKTIF, JUJUR DAN TRANSPARAN DALAM KEHIDUPAN RAKYAT
- MEMPERBANYAK RUANG-RUANG KREATIFITAS DAN SENI BUDAYA YANG DIISI RAKYAT PEKERJA





PEMBERANTASAN KORUPSI

EKONOMI

- MELARANG KERAS TERJADINYA KONFLIK KEPENTINGAN APAPUN ANTARA PELAKU BISNIS DAN PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DALAM MENYELENGGARAKAN PROYEK EKONOMI. MENAGIH UTANG KE SELURUH PENGEMPLANG PAJAK DAN KASUS-KASUS KORUPSI BESAR MASA LALU

POLITIK

- LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) HARUS DIINVESTIGASI SUMBERNYA BISA BESARNYA TAK WAJAR
- MENYITA ASET KORUPTOR SESUAI BESARAN KORUPSINYA

HUKUM

- MENCABUT REVISI UU KPK YANG MEMBUAT PEGAWAI KPK DI BAWAH ASN
- MEMPERKUAT KPK
- MEREVISI UU TINDAK PIDANA KORUPSI AGAR HUKUMAN KORUPTOR DIPERBERAT HINGGA MINNIMAL HUKUMAN SEUMUR HIDUP
- BILA MASUK PARLEMEN AKAN MEMBONGKAR BUDAYA KORUPSI DI KALANGAN ANGGOTA DPRD & DPR

SOSIAL BUDAYA

- MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI SEJAK DINI DI SEKOLAH-SEKOLAH
- MENDORONG MASYARAKAT MEMBERIKAN SANKSI SOSIAL BAGI KORUPTOR
- DENGAN LEBIH BERBUDAYA, RAKYAT AKAN LEBIH MEMILIKI RASA MALU DAN LEBIH BERTANGGUNG JAWAB, SEHINGGA MENJAUHKAN KEINGINAN UNTUK MELAKUKAN KORUPSI
- MENDORONG BUDAYAWAN & SENIMAN MENGHASILKAN KARYA-KARYA BERTEMAKAN ANTI KORUPSI

JAMINAN SOSIAL

EKONOMI

- JAMINAN SOSIAL YANG BERMUTU ITUMAHAL, MAKA MEMBUTUHKAN KESIAPAN DARI PELAKU EKONOMI & RAKYAT BANYAK UNTUK MELAKUKAN IURAN BERSAMA
- SUMBANGAN UNTUK BPJS TK AKAN DITINGKATKAN DARI SEBELUMNYA 5% KE DEPAN MENJADI 10% DENGAN KOMPOSISI 3% DITANGGUNG PEKERJA & 7% DITANGGUNG PERUSAHAAN
- SEKTOR EKSTRAKTIF (SEPERTI SAWIT & BATUBARA) HARUS MENGALOKASIKAN 5% PERDAPATANNYA UNTUK MEMBIAYAI JAMINAN SOSIAL RAKYAT
- MEMBERIKAN JAMINAN KEMATIAN RP 10 JUTA
- MEMBERIKAN JAMINAN RP 1 JUTA/BULAN KEPADA RAKYAT MISKIN UNTUK BISA MAKAN

POLITIK

- MENDORONG SELURUH RAKYAT INDONESIA UNTUK AKTIF MENGAWASI PELAYANAN JAMINAN SOSIAL
- MEMASTIKAN TRANSPARANSI DANA BPJS BAGI RAKYAT

HUKUM

- MENDORONG APARAT PENEGAK HUKUM MENGAWASI KETAT POTENSI PENYELEWENGAN DALAM PENGGUNAAN DANA BPJS

SOSIAL BUDAYA

- MENDUKUNG DIBERIKANYA SANKSI SOSIAL BAGI YANG TIDAK MENDUKUNG PROGRAM JAMINAN SOSIAL
- MENDORONG MASYARAKAT LEBIH AKTIF MENGAWASI PROGRAM JAMINAN SOSIAL NASIONAL



KEDAULATAN PANGAN DAN REFORMA AGRARIA



EKONOMI

- MEMBATASI PENGUASAAN PANGAN OLEH KOORPORASI
- PENGGUNAAN SUMBER DAYA ALAM SECARA BERKELANJUTAN
- MENJAGA RASIO HARGA GABAH DENGAN HARGA PUPUK 3:2 AGAR PETANI SELALU UNTUK SETIAP PANEN
- MENGUBAH TATA NIAGA IMPOR PANGAN DARI SISTEM KUOTA MENJADI SISTEM TARIF AGAR TIDAK MERUGIKAN PETANI
- MEMBANGUN LUMBUNG PANGAN NASIONAL DI SULAWESI KARENATANAHNYA DATAR DAN LUAS SERTA BANYAK DIALIRI SUNGAI

POLITIK

- MELAKUKAN PEMBAHARUAN AGRARIA
- MEMBERI AKSES KEPADA PETANI KECIL UNTUK PERUMUSAN KEBIJAKAN

HUKUM

- MELARANG PENGGUNAAN PANGAN SEBAGAI SENJATA
- MEMASTIKAN PENEGAKKAN HUKUM YANG MEMIHAK KEPADA RAKYAT KECIL DALAM SENGKETA AGRARIA

SOSIAL BUDAYA

- MEMASTIKAN RAKYAT MENDAPAT AKSES TERHADAP PANGAN SEHAT DAN BERGISI
- MENDORRONG DIHASILKANNYA KARYA-KARYA SENI BUDAYA BERTEMAKAN KECINTAAN TERHADAP SEKTOR AGRARIA

UPAH

EKONOMI

- KAITZ INDEX (RASIO ANTARA UPAH MINIMUM DENGAN UPAH MEDIAN) RATA-RATA INDONESIA ADALAH 0,24. SEMENTARA INDEX NEGARA-NEGARA EROPA BERKISAR DARI 0,4 - 0,6; INDONESIA SANGAT JAUH TERTINGGAL.. AGAR DAPAT MENGEJARTINGKAT KESEJAHTERAAN BURUH EROPA, HARUS DIDORONG BESARAN KENAIKAN UPAH SETIAP TAHUNNYA SEBESAR 2 KALI LIPAT PERTUMBUHAN EKONOMI. MISALKAN PERTUMBUHAN EKONOMI 3,5%, MAKA KENAIKAN UPAH SEHARUSNYA 7%

POLITIK

- MEMASTIKAN KEBIJAKAN PENGUPAHAN BERPIHAK KEPADA KELAS PEKERJA
- MEMASTIKAN PENGESAHAN UU PERLINDUNGAN PEKERJA RUMAH RANGGA

HUKUM

- MEMASTIKAN PENEGAKKAN HUKUM BERPIHAK KEPADA KEPENTINGAN KELAS PEKERJA DALAM SETIAP SENGKETA UPAH

SOSIAL BUDAYA

- MENDORONG BUDAYAWAN DAN SENIMAN UNTUK MENGHASILKAN KARYA-KARYA YANG BERPIHAK KEPADA PERJUANGAN UPAH LAYAK BAGI BURUH



PAJAK BERKEADILAN

EKONOMI

- MENGENAKAN PAJAK PENGHASILAN SEBESAR 40% BAGI INDIVIDU SUPER KAYA YANG BERPENGHASILAN DI ATAS RP 20 MILYAT SETAHUN
- MENGENAKAN PAJAK ATAS PENDAPATAN MODAL (**CAPITAL GAIN TAX**) 15% UNTUK PENDAPATAN PASAR SAHAM, PASAR KEUANGAN & PASAR PROPERTI.

POLITIK

- MEMBATALKAN KENAIKAN PAJAK YANG MERUGIKAN RAKYAT MISKIN, SEPERTI PPN, PENDIDIKAN DAN LAIN-LAIN
- MENOLAK DIBERLAKUKANNYA TAX AMNESTY JILID 2, OLEH KARENA ITU UU HARMONISASI PERATURAN PAJAK HARUS DIREVISI
- MEMBERLAKUKAN DIGITALISASI PAJAK DEMI TRANSPARANSI SISTEM PERPAJAKAN AGAR SEMUA RAKYAT DAPAT MENGAKSES DAN MENGAWASI CATATAN PEMBAYARAN PAJAK ORANG & PENGUSAHA.

HUKUM

- HUKUMAN PENJARA MINIMAL SEUMUR HIDUP BAGI PETUGAS PAJAK YANG BERMAIN MATA DENGAN WAJIB PAJAK
- PENEGAKKAN KEPATUHAN PAJAK DENGAN MENCABUT IZIN USAHA BILA DITEMUKAN KASUS PELANGGARAN PAJAK

SOSIAL BUDAYA

- MENGKAMPANYEKAN TEMA KEADILAN SOSIAL AGAR MASYARAKAT YANG LEBIH KAYA BERSEDIA BERBAGI DENGAN MEMBAYAR PAJAK YANG LEBIH TINGGI





HUBUNGAN INDUSTRIAL

EKONOMI

- DEMI MENCIPTAKAN HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG HARMONIS, MASYARAKAT HARUS ADIL DAN MAKMUR; YAITU PERTUMBUHAN EKONOMI HARUS TINGGI DI ATAS 10% SETIAP TAHUN DENGAN INDEKS GINI RATIO YANG TERUS MENURU DARI SAAT INI SEKITAR 0,39 MENJADI SAMPAI DIBAWAH 0,3 PADA TAHUN KE 10

HUKUM

- PARA PENEGAK HUKUM HARUS DITEKAN UNTUK LEBIH NETRAL DALAM PENANGANAN SENGKETA PEKERJA DENGAN PENGUSAHA

POLITIK

- POLITIK DI PARLEMEN NASIONAL DAN LOKAL HARUS LEBIH TEGAS BERPIHAK PADA KELAS PEKERJA DALAM SETIAP SENGKETA

SOSIAL BUDAYA

- MENDORONG SENIMAN DAN BUDAYAWAN UNTUK LEBIH BANYAK MEMPRODUKSI KARYA-KARYA YANG MEMPROMOSIKAN KEADILAN DALAM HUBUNGAN INDUSTRIAL



LINGKUNGAN HIDUP, HAM & MASYARAKAT ADAT



EKONOMI

- MENDORONG PEMBANGUNAN ENERGI BERSIH DAN TERBARUKAN SECARA MASIF
- MEMAKSA PARA PEMBUANG LIMBAH UNNTUK MEMBAYAR LEBIH BANYAK PAJAK DALAM RANGKA PERBAIKAN KERUSAKAN LINGKUNGAN

POLITIK

- MELUASKKAN PERSPEKTIF POLITIK DI PARLEMEN NASIONAL DAN DAERAH YANG LEBIH BERPIHAK TERHADAP KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP
- AKTIF BERDIPLOMASI UNNTUK MELINDUNGI NASIB PEKERJA MINGRAN INDONESIA
- MENGESAHKAN UU PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAR

HUKUM

- MELINDUNGI KEBEBASAN BERSERIKAT BAGI SETIAP PEKERJA DI INDONESIA
- PENEGAKKAN HUKUMAN YANG KERAS (PENJARAKAN BOSNYA) DAN DENDA YANG BESAR BAGI PERUSAHAAN PEMBAKAR HUTAN & PERUSAK LINGKUNGAN LAINNYA
- MENGHETIKAN SEGALA MACAM PENGGUNAAN & PERAMPASAN HAK-HAK MASYARAKAT ADAT

SOSIAL BUDAYA

- MENDORONG PARA SENIMAN & BUDAYAWAN UNTUK MENGANGKAT PERSOALAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN KERUSAKAN LINGKUNGANN DAN TERGERUSNYA HAK-HAK MASYARAKAT ADAT



PERLINDUNGAN PEREMPUAN & ANAK

EKONOMI

- MEMASTIKAN NEGARA MEMBERIKAN TUNJANGAN PADA IBU RUMAH TANGGA SEBESAR 50% UMP PER ORANG ATAS PEKERJAAN DOMESTIK MEREKA
- MEMASTIKAN NEGARA MENGGRATISKAN BIAYA NIKAH

HUKUM

- MEMAKSA PENEGAK HUKUM UNTUK LEBIH BERPIHAK KEPADA PARA KORBAN KEKERASAN

POLITIK

- MENDORONG MAJU PARA PEMIMPIN PEREMPUAN UNTUK LEBIH AKTIF BERKIPRAH DALAM POLITIK DAN SEKTOR BISNIS
- MENDUKUNNG PENGESAHAN UU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL

SOSIAL BUDAYA

- PEMBANGUNAN TEMPAT PENITIPAN ANAK (DAY CARE) YANG DIGRATISKAN DI BASIS-BASIS INDUSTRI DI PERKOTAAN
- MENDIRONG SENIMAN& BUDAYAWAN UNTUK MENGHASILKAN KARYA-KARYA YANG MEMBELA HAK-HAK PEREMPUAN & ANAK

PEMBERDAYAAN WARGA BERKEBUTUHAN KHUSUS

EKONOMI

- SELURUH WARGA BERKEBUTUHAN KHUSUS HARUS DIDAHULUKAN DALAM HAL KESEMPATAN KERJA
- NEGARA HARUS MEMBANGUN FASILITAS-FASILITAS UNTUK WARGA BERKEBUTUHAN KHUSUS DI BERBAGAI RUANG PUBLIK SEPERTI PASAR, MALL, RUMAH SAKIT, SEKOLAH, DLL

POLITIK

- POLITIK NEGARA HARUS MELINDUNGI HAK-HAK WARGA BERKEBUTUHAN KHUSUS

HUKUM

- PENEGAK HUKUM HARUS MENDAHULUKAN & MELINDUNGI WARGA BERKEBUTUHAN KHUSUS

SOSIAL BUDAYA

- SEKOLAH-SEKOLAH KEBUTUHAN KHUSUS YANG DIMILIKI NEGARA HARUS DITINGKATKAN KUALITASNYA & DIPERBANYAK
- MENYEDIAKAN RUANG & KARYA YANG MENDORONG PERLINDUNGAN HAK WARGA BERKEBUTUHAN KHUSUS





TENAGA HONORER & PENDIDIK



EKONOMI

- NEGARA HARUS MENYEDIAKAN ANGGARAN UNTUK MENANGKAT SELURUH GURU HONORER MENJADI PNS

POLITIK

- POLITIK DI PARLEMEN NASIONAL & DAERAH HARUS MENDUKUNG PERLINDUNGAN BAGI GURU HONORER

HUKUM

- MEMASTIKAN PENEGAK HUKUM MENDUKUNG PERJUANGAN TENAGA HONORER DAN PENDIDIK

SOSIAL BUDAYA

- LEWAT KARYA SENI & BUDAYA MENDORONG PEMERINTAH MENANGKAT SELURUH TENAGA HONORER

KOPERASI DAN BUMN

EKONOMI

- MENURUNKAN SUKU BUNGA KREDIT PINJAMAN BAGI KOPERASI UMKM MENJADI DIBAWAH 10%
- MEMBANTU AKSES EKSPOR KE APSAR INTERNASIONAL BAGI KOPERASI-KOPERASI PRODUK UNGGULAN
- MEMAJUKAN SISTEM MANAJEMEN KOPERASI DI INDONESIA HINGGA MENYAMAI KOPERASI DI SKANDINAVIA

POLITIK

- MENDUKUNG PENINGKATAN ANGGARAN KEMENTERIAN UMKM UNTUK LEBIH BANYAK MEMBERIKAN BANTUAN PERMODALAN BAGI KOPERASI
- MENGURANGI KEBIJAKAN PENYERTAAN MODAL NEGARA UNTUK BUMN SAKIT

HUKUM

- MELIBATKAN PENEGAK HUKUM & KPK UNTUK MENJAGA INTEGRITAS PERSONIL BUMN

SOSIAL BUDAYA

- MENDORONG PARAPEKERJA SENI DAN BUDAYA UNTUK MENGHASILKAN KARYA YANG MENDUKUNG SEMANGAT MEMBANGUN KOPERASI
- MENDORONG PARA ARTIS TERKEMUKA UNTUK MENJADI AMBASADOR BUMN-BUMN DI LEVEL INTERNASIONAL



PARTAI BURUH MENANG, MENANG, MENANG

